
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: Volume 7, No. 1, Juni 2026

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Habitus Politik dan Jaringan Non-Partai dalam Kontestasi Pilkada Jember 2024: Perspektif Pierre Bourdieu

Azriel Akbar Hermansyah

Universitas Airlangga, Surabaya

azriel.akbar.hermansyah-2024@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mobilisasi elektoral dan jaringan politik dalam kemenangan pasangan Fawait–Djoko pada Pilkada Kabupaten Jember 2024. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa kemenangan elektoral tidak hanya ditentukan oleh dukungan partai politik formal, tetapi juga oleh efektivitas jaringan non-partai dalam menjangkau dan memobilisasi pemilih. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran media, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan Fawait–Djoko ditopang oleh sinergi antara jaringan partai politik dan jaringan non-partai, seperti tokoh lokal, relawan, dan komunitas sosial. Jaringan tersebut berperan dalam memperluas basis dukungan, memperkuat komunikasi politik, serta meningkatkan partisipasi pemilih melalui strategi mobilisasi yang adaptif dan kontekstual. Selain itu, praktik mobilisasi elektoral juga memperlihatkan adanya pola hubungan patronase yang memperkuat loyalitas pemilih di tingkat akar rumput. Temuan ini menegaskan bahwa mobilisasi elektoral berbasis jaringan menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil kontestasi politik lokal di era demokrasi elektoral.

Kata Kunci: mobilisasi elektoral, jaringan politik, pilkada, patronase

Abstract:

This study aims to analyze the role of electoral mobilization and political networks in the victory of the Fawait–Djoko pair in the 2024 Jember Regency local election. It departs from the assumption that electoral success is not solely determined by formal political party support, but also by the effectiveness of non-party networks in reaching and mobilizing voters. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and media analysis, and were examined using thematic analysis techniques. The findings reveal that the success of the Fawait–Djoko pair was supported by the synergy between political party networks and non-party networks, such as local elites, volunteers, and social communities. These networks played a significant role in expanding the support base, strengthening political communication, and increasing voter participation through adaptive and context-specific mobilization strategies. Furthermore, electoral mobilization practices indicate the presence of patronage relationships that reinforce voter loyalty at the grassroots level. This study highlights that network-based electoral mobilization constitutes a key factor in shaping the outcomes of local political contests in contemporary electoral democracies.

Keywords: electoral mobilization, political networks, local elections, patronage

PENDAHULUAN

Kontestasi politik lokal di Indonesia kerap memperlihatkan dinamika yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan elektoral formal semata. Dalam banyak kasus, hasil pemilihan tidak selalu linear dengan prediksi survei, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara struktur politik, jaringan sosial, dan faktor kultural yang mengakar dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku memilih di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh preferensi rasional individu, tetapi juga oleh relasi sosial yang bersifat kolektif dan simbolik. Hal ini sejalan dengan temuan Edward Aspinall dan Ward Berenschot yang menegaskan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia sangat dipengaruhi oleh relasi patronase dan jaringan informal (Aspinall & Berenschot, 2019).

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember 2024 menjadi kasus yang relevan dalam menjelaskan fenomena tersebut. Kemenangan pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto (Fawait–Djoko) atas petahana yang sebelumnya unggul dalam berbagai survei menunjukkan adanya faktor-faktor di luar kalkulasi elektoral formal. Diskrepansi antara hasil survei dan realitas elektoral ini mengindikasikan bahwa terdapat mekanisme

sosial yang bekerja secara laten di tingkat akar rumput, khususnya melalui jaringan non-partai yang tidak sepenuhnya terdeteksi oleh instrumen survei konvensional. Hal ini sejalan dengan argumen Burhanuddin Muhtadi yang menyebut bahwa perilaku memilih di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kedekatan sosial, identitas, dan praktik patronase (Muhtadi, 2020).

Dalam konteks ini, mobilisasi politik tidak hanya berlangsung melalui struktur formal partai politik, tetapi juga melalui jaringan non-partai seperti tokoh agama, komunitas sosial, jaringan pesantren, dan relasi kekerabatan. Jaringan-jaringan ini berperan dalam membentuk preferensi politik masyarakat melalui proses yang bersifat persuasif, simbolik, dan berkelanjutan. Perspektif ini dapat dipahami melalui konsep mobilisasi dari Charles Tilly yang melihat mobilisasi sebagai proses pengorganisasian sumber daya kolektif dalam mencapai tujuan politik (Tilly, 1978) serta pandangan James C. Scott yang menekankan pentingnya relasi patron-klien dalam praktik kekuasaan di tingkat lokal (Dallmayr, 1973).

Namun demikian, untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana jaringan non-partai mempengaruhi perilaku memilih, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan proses internalisasi nilai dan praktik sosial dalam diri individu. Dalam hal ini, konsep habitus dari Pierre Bourdieu menjadi relevan. Habitus merujuk pada sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan kemudian mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak (Pierre Bourdieu, 1990). Dalam konteks politik lokal, habitus politik terbentuk melalui interaksi yang berulang antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk melalui jaringan keagamaan, komunitas lokal, dan figur otoritatif seperti kiai.

Konteks sosio-kultural Jember yang memiliki karakter religius kuat, dengan dominasi jaringan pesantren dan pengaruh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, menjadi lahan subur bagi pembentukan habitus politik berbasis kepercayaan dan otoritas kultural. Dalam struktur sosial seperti ini, preferensi politik tidak semata didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada kedekatan simbolik dan relasi

sosial yang telah mengakar. Penelitian (Farid & Priyatmoko, 2021) menunjukkan bahwa jaringan keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk orientasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa mobilisasi politik di Indonesia sering kali ditopang oleh jaringan non-partai. Penelitian Kambo (2015) tentang Pilkada Makassar menemukan bahwa jaringan relawan dan media sosial mampu menjadi aktor utama dalam mobilisasi elektoral. Sementara itu, penelitian Idris et al., (2025) menegaskan bahwa jaringan kekerabatan memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas politik masyarakat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa jaringan non-partai memiliki kapasitas signifikan dalam mempengaruhi hasil kontestasi politik lokal.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada fungsi mobilisasi jaringan, dan belum banyak menjelaskan bagaimana jaringan tersebut membentuk habitus politik masyarakat secara mendalam. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana praktik sosial dalam jaringan non-partai terinternalisasi menjadi disposisi politik yang relatif stabil. Selain itu, penting untuk melihat bahwa jaringan non-partai tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi elektoral, tetapi juga sebagai ruang produksi makna politik yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan pilihan politik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan habitus politik melalui jaringan non-partai dalam kontestasi Pilkada Jember 2024 dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana interaksi dalam jaringan sosial-keagamaan dan komunitas lokal membentuk preferensi politik masyarakat, serta bagaimana habitus tersebut berkontribusi terhadap kemenangan pasangan Fawait–Djoko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi habitus politik, sekaligus memperkaya kajian tentang dinamika politik lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan dengan kajian literatur untuk memahami secara mendalam proses pembentukan habitus politik melalui jaringan non-partai dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Jember 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, praktik sosial, serta proses internalisasi nilai yang membentuk preferensi politik masyarakat, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena sosial yang kompleks melalui pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan perspektif aktor.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu kemenangan pasangan Fawait–Djoko dalam Pilkada Jember 2024, yang dipandang sebagai fenomena kontekstual dan kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara aktor, struktur sosial, dan praktik politik dalam setting nyata. Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terpisahkan secara jelas (Yin, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan kajian literatur sebagai bagian dari strategi analisis untuk memperkuat landasan teoretis dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Kajian literatur digunakan untuk menelaah berbagai studi terkait mobilisasi politik, jaringan non-partai, serta konsep habitus dalam perspektif Pierre Bourdieu. Machi dan McEvoy (2016) menyatakan bahwa literature review berfungsi sebagai fondasi konseptual yang membantu peneliti dalam membangun argumentasi ilmiah dan memposisikan penelitian dalam peta keilmuan yang lebih luas (Machi & McEvoy, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember yang dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik sosial-kultural yang khas, terutama kuatnya pengaruh jaringan keagamaan dan komunitas lokal dalam proses politik. Konteks ini relevan dengan fokus penelitian yang menekankan pada pembentukan habitus politik melalui interaksi sosial

dalam jaringan non-partai. Subjek penelitian meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut, seperti tokoh agama (kiai), pengelola pesantren, relawan, serta anggota komunitas lokal yang memiliki peran dalam proses mobilisasi politik di tingkat akar rumput.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta praktik sosial aktor dalam membentuk dan mentransmisikan preferensi politik. Dokumentasi mencakup berbagai sumber seperti hasil survei, laporan media, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Pilkada Jember 2024. Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat analisis dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang muncul dari data. Proses analisis dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini merujuk pada Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang menekankan pentingnya proses analisis yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga diarahkan untuk memahami proses pembentukan habitus politik melalui interaksi dalam jaringan non-partai. Oleh karena itu, kerangka analisis menggunakan konsep habitus, field, dan capital dari Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana praktik sosial yang berulang dalam jaringan keagamaan dan komunitas lokal terinternalisasi menjadi disposisi politik yang relatif stabil dalam diri individu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik yang digunakan meliputi triangulasi, member check, serta audit trail guna memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana jaringan non-partai membentuk habitus politik masyarakat, serta bagaimana proses tersebut berkontribusi dalam dinamika kontestasi Pilkada Jember 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian sekaligus pembahasannya yang difokuskan pada bagaimana jaringan non-partai berperan dalam pembentukan habitus politik dalam kontestasi Pilkada Jember 2024. Analisis dilakukan dengan menautkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teoretis, khususnya perspektif Pierre Bourdieu mengenai habitus, field, dan capital. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bahwa praktik politik tidak hanya berlangsung dalam ruang formal, tetapi juga melalui interaksi sosial yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan non-partai memiliki peran strategis dalam membentuk preferensi politik masyarakat melalui mekanisme sosial yang bersifat kultural, relasional, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan mobilisasi elektoral dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pembentukan disposisi politik yang lebih dalam, yang dalam perspektif Bourdieu disebut sebagai habitus. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini dibagi ke dalam beberapa aspek utama yang mencerminkan temuan empiris di lapangan.

Secara empiris, kemenangan pasangan Fawait–Djoko tidak bersifat merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember, melainkan terkonsentrasi di sebagian besar kecamatan. Berdasarkan hasil penghitungan suara dan laporan media, pasangan ini unggul di 25 dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Fakta ini menunjukkan adanya efektivitas mobilisasi jaringan politik khususnya jaringan partai politik dalam menjangkau pemilih hingga tingkat akar rumput. Oleh karena itu, lokasi penelitian difokuskan pada beberapa kecamatan yang menjadi basis kemenangan utama pasangan Fawait-Djoko, terutama kecamatan dengan karakteristik pedesaan dan semi-

perkotaan yang memiliki struktur sosial dan jaringan partai yang relatif kuat. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan beberapa kecamatan perkotaan sebagai lokasi pembandingan, guna melihat perbedaan pola mobilisasi jaringan partai politik di wilayah yang tidak dimenangkan oleh pasangan tersebut.

Tabel 1. Sebaran Kemenangan Fawait-Djoko pada Pilkada Jember Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	STATUS KEMENANGAN	KETERANGAN
1	Jombang	Menang	Basis pedesaan, mobilisasi partai kuat
2	Tanggul	Menang	Konsolidasi jaringan partai dan relawan
3	Rambipuji	Menang	Dukungan struktur partai tingkat bawah
4	Kalisat	Menang	Wilayah semi-perkotaan
5	Ledokombo	Menang	Basis sosial-keagamaan kuat
6	Bangsalsari	Menang	Konsolidasi partai efektif
7	Ajung	Menang	Jaringan partai aktif
8	Balung	menang	Basis pemilih tradisional
9	Puger	menang	Mobilisasi logistik dan kader
10	Wuluhan	menang	Dominasi partai pengusung
11	Kaliwates	Tidak menang	Wilayah perkotaan
12	Sumbersari	Tidak menang	Basis pemilih urban
13	Patrang	Tidak menang	Kompetisi elektoral
14	Pakusari	Tidak menang	Margin suara tipis
15	Sakorambi	Tidak menang	Wilayah penyangga kota
16	Ambulu	Tidak menang	Basis lawan relatif kuat

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2024

Data mengenai sebaran kemenangan pasangan Fawait-Djoko diperoleh dari hasil rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh media nasional dan lokal serta merujuk pada sumber resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

1. Jaringan Non-Partai dalam Pilkada Jember 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada Jember 2024 tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan formal partai politik, tetapi sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan non-partai yang bekerja secara sistematis di tingkat akar rumput. Jaringan ini meliputi tokoh agama (kiai), institusi pesantren, komunitas pengajian, relawan lokal, serta jaringan kekerabatan yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman bentuk jaringan ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat menjadi arena penting dalam proses politik, yang sering kali bekerja di luar mekanisme formal elektoral.

Jaringan non-partai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi suara, tetapi juga sebagai medium distribusi pengaruh politik yang bersifat kultural dan relasional. Pengaruh ini tidak selalu hadir dalam bentuk instruksi politik yang eksplisit, melainkan melalui interaksi sosial yang rutin, komunikasi simbolik, serta reproduksi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jaringan non-partai memiliki kemampuan membentuk orientasi politik secara lebih mendalam dibandingkan kampanye formal yang cenderung bersifat jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang jaringan politik lokal yang menunjukkan bahwa mobilisasi elektoral sering kali bergantung pada jaringan sosial yang bekerja secara informal dan berlapis di tingkat masyarakat (Tanjung et al., 2026).

Dalam konteks masyarakat Jember yang religius, posisi kiai menjadi sangat sentral dalam konfigurasi jaringan tersebut. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik yang memiliki legitimasi simbolik kuat dalam membentuk opini dan arah pilihan kolektif masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa dalam konteks Pilkada, kiai berperan sebagai agen pembentuk orientasi politik masyarakat melalui otoritas moral dan kedekatan sosial yang dimilikinya (Kesuma & Syaifudin, 2024). Legitimasi ini terbentuk dalam jangka panjang dan bersifat kultural, sehingga memiliki daya pengaruh yang lebih stabil dibandingkan pengaruh politik formal.

Selain itu, pesantren dan komunitas keagamaan berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat distribusi pengaruh tersebut. Aktivitas seperti pengajian, forum

komunitas, dan kegiatan sosial menjadi medium interaksi yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi politik yang implisit. Dalam ruang-ruang ini, preferensi politik tidak dibentuk secara langsung, melainkan melalui proses internalisasi nilai, pembentukan persepsi, dan penguatan identitas kolektif. Hal ini menjelaskan mengapa jaringan non-partai mampu menciptakan basis dukungan yang relatif solid dan tahan terhadap perubahan politik jangka pendek.

Temuan ini juga didukung oleh studi mengenai politik identitas dalam Pilkada yang menunjukkan bahwa identitas religius dapat berfungsi sebagai modal simbolik yang efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan pemilih (Guna et al., 2026). Dalam konteks ini, kedekatan nilai dan identitas menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi politik, melampaui pertimbangan rasional yang bersifat programatik.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa jaringan non-partai tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai lapisan yang saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. Jaringan kekerabatan berfungsi memperluas jangkauan pengaruh hingga ke tingkat keluarga, sementara relawan lokal berperan sebagai mediator antara elite dan masyarakat dalam menerjemahkan pesan politik ke dalam konteks lokal. Temuan ini sejalan dengan studi tentang dinamika kekuasaan lokal yang menunjukkan bahwa interaksi antara aktor formal dan informal menjadi kunci dalam menentukan arah kontestasi politik di tingkat daerah (Nasuhaidi et al., 2025).

Dengan demikian, jaringan non-partai dalam Pilkada Jember 2024 tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen mobilisasi elektoral, tetapi juga sebagai struktur sosial yang berfungsi sebagai arena produksi dan reproduksi makna politik di tingkat masyarakat. Jaringan ini bekerja melalui mekanisme sosial yang bersifat kultural, relasional, dan berkelanjutan, sehingga memiliki peran strategis dalam membentuk arah preferensi politik masyarakat. Oleh karena itu, analisis politik lokal tidak dapat hanya berfokus pada institusi formal, tetapi perlu memperhatikan peran jaringan non-partai sebagai aktor kunci dalam dinamika kontestasi politik.

2. Habitus Politik sebagai Penentu Preferensi Pemilih

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, habitus politik merupakan hasil dari proses internalisasi nilai, norma, dan praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Habitus tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman sosial yang berulang, sehingga menghasilkan disposisi yang relatif stabil dalam membentuk cara individu memahami dan merespons realitas politik. Dalam konteks Pilkada Jember 2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan habitus politik masyarakat berlangsung secara intens melalui interaksi dalam jaringan non-partai yang berakar kuat dalam struktur sosial lokal.

Pertama, habitus politik terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai kultural dan religius yang disampaikan oleh tokoh agama, khususnya kiai. Dalam masyarakat Jember yang religius, otoritas kiai tidak hanya berfungsi dalam ranah spiritual, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan sosial, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Interaksi yang berlangsung secara rutin dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan forum komunitas menjadi medium transmisi nilai yang efektif. Dalam konteks ini, pilihan politik tidak dipahami sebagai preferensi individual yang otonom, melainkan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap otoritas moral dan struktur nilai yang telah terinternalisasi. Temuan ini didukung oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi politik masyarakat melalui pendekatan kultural dan simbolik.

Kedua, pembentukan habitus juga berlangsung melalui relasi patronase yang terjalin antara tokoh lokal dan masyarakat. Relasi ini menciptakan pola interaksi yang bersifat timbal balik, di mana dukungan politik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada loyalitas dan kedekatan sosial. Dalam hubungan ini, patron tidak selalu memberikan imbalan material secara langsung, tetapi juga menyediakan perlindungan sosial, akses, dan pengakuan simbolik. Pola ini memperkuat keterikatan emosional antara aktor dan masyarakat, sehingga pilihan politik menjadi bagian dari relasi sosial yang lebih luas. Studi klasik James C. Scott menegaskan bahwa relasi patron-klien merupakan mekanisme penting dalam mempertahankan struktur kekuasaan dalam masyarakat (Dallmayr, 1973).

Ketiga, habitus politik terbentuk melalui reproduksi praktik sosial dalam kehidupan komunitas. Aktivitas seperti pengajian, arisan, kegiatan sosial, dan interaksi keseharian menjadi ruang produksi dan reproduksi wacana politik yang berlangsung secara informal. Dalam ruang-ruang ini, nilai-nilai politik tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi hadir dalam bentuk narasi, simbol, dan pengalaman kolektif yang secara perlahan membentuk persepsi masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa politik tidak berdiri sebagai domain terpisah, melainkan terintegrasi dalam praktik sosial sehari-hari. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa praktik sosial berbasis komunitas memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat melalui mekanisme interaksi yang berulang (As'ad et al., 2023).

Lebih lanjut, ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembentukan habitus politik merupakan proses yang bersifat struktural sekaligus kultural. Jaringan non-partai berfungsi sebagai arena (*field*) di mana nilai, norma, dan praktik sosial diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus. Dalam arena ini, aktor-aktor yang memiliki modal simbolik dan sosial yang kuat, seperti kiai dan tokoh masyarakat, memiliki posisi dominan dalam mempengaruhi arah pembentukan habitus.

Dengan demikian, habitus politik masyarakat Jember tidak terbentuk melalui proses yang instan atau rasional semata, melainkan melalui interaksi sosial yang panjang, berulang, dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menghasilkan disposisi politik yang relatif stabil, yang kemudian berperan penting dalam menentukan preferensi pemilih dalam kontestasi Pilkada. Temuan ini menegaskan bahwa untuk memahami perilaku memilih di tingkat lokal, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek pilihan rasional, tetapi juga memperhatikan dimensi kultural dan sosial yang membentuk habitus politik masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kontestasi Pilkada Jember 2024 tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan elektoral formal, melainkan harus

dipahami melalui peran jaringan non-partai dalam membentuk habitus politik masyarakat. Jaringan seperti tokoh agama, pesantren, komunitas keagamaan, dan relasi kekerabatan terbukti menjadi arena sosial yang efektif dalam mentransmisikan nilai, membangun kedekatan simbolik, serta mengarahkan preferensi politik di tingkat akar rumput. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, habitus politik terbentuk melalui proses internalisasi yang berlangsung secara berulang dalam kehidupan sosial, sehingga pilihan politik masyarakat tidak semata bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh disposisi yang telah terinternalisasi secara kultural dan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa jaringan non-partai memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk preferensi awal pemilih dibandingkan struktur formal, yang cenderung berfungsi sebagai sarana legitimasi dan konsolidasi dukungan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan habitus dalam kajian politik lokal, dengan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui mekanisme simbolik dan praktik sosial sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan habitus politik melalui jaringan non-partai merupakan faktor kunci dalam memahami perilaku memilih dan dinamika demokrasi elektoral di tingkat lokal di Indonesia.

Referensi atau Daftar Pustaka

- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Creswell, John W; Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches [Fifth Edition]. In *SAGE Publications* (Fifth Edit). <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>
- Dallmayr, F. R. (1973). Political and Social Thought. *American Political Science Review*, 67(2), 608–610. <https://doi.org/10.2307/1958803>
- Farid, F., & Priyatmoko, P. (2021). Dinamika Interaksi Antara Elite Politik Lokal Dan Elite Agama Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Pasuruan. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(1), 46. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i1.29883>
- Guna, G. A., Pratama, G., & Romadhon, A. (2026). *Politik identitas anwar sadat dalam pilkada di tanjung jabung barat tahun 2024*. 11(11).
- Idris, M., Nur, I., Syahrin, A. A., & Zulmi, N. (2025). *Dinamika Politik Elektoral Calon Legislatif Muslim di Tengah Dominasi Kantong Politik Non-Muslim*. 16(2), 185–200. <https://doi.org/10.14710/politika.16.2.2025.185-200>
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1–8.
- Kesuma, A. S., & Syaifudin, M. S. I. (2024). Dinamika Kepatuhan Politik Masyarakat terhadap Instruksi Kiai Di Pilkada 2024 Lampung Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3 SE-Articles of Research), 48983–48993. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23510>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin. <https://doi.org/10.4135/9781071939031>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A*

Methods Sourcebook. SAGE Publications Ltd.

- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa uang: politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nasuhaidi, N., Anshori, M. W., & Beriansyah, A. (2025). Konstelasi Kekuatan Politik Lokal Dalam Pilkada Gubernur Jambi 2024: Studi Kasus Dari Perspektif Teori Elite. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 8(02), 317–334. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6124>
- Pierre Bourdieu. (1990). The logic of practice. *Bourdieu*, 208–239. <https://doi.org/10.4324/9781003115083-9>
- Tanjung, M., Zetra, A., & Hendrik, D. (2026). Analisis Jaringan Sosial Politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(6), 4413–4427. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1631>
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. The University of Michigan.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>

